



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ENDANG BUDI FATMAWATI**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN**
3. NHK : **239923**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **326.425.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 90.225.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 41.200.000
4. Tanah Seluas 1.150 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
6. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **190.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SOLO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS 1,5 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.129.493.110
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.645.918.110
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.645.918.110

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.